

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

**KINERJA PARTAI POLITIK GERINDRA DALAM KADERISASI
POLITISI PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Disusun oleh:

Devita Lili Oktaviana
NIM 15401244004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Universitas Negeri Yogyakarta

Pada tanggal 27 Mei 2019

TIM PENGUJI


Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Halili, S.Pd.,M.A		24/06 2019
Ketua Penguji/Pembimbing Dr. Subarno, M.Si		22/6 2019
Sekretaris Dr. Sunarso, M.Si		19/6/19
Penguji Utama		

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,




Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

KINERJA PARTAI GERINDRA DALAM KADERISASI POLITISI PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA

PERFORMANCE GERINDRA POLITICAL PARTY IN THE REGENERATION OF FEMALE POLITICIANS IN THE PEOPLE REPRESENTATIVE COUNCIL OF YOGYAKARTA CITY

Devita Lili Oktaviana dan Halili
devita.lili2015@student.uny.ac.id

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan kinerja partai politik Gerindra dalam kaderisasi politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta serta kaderisasi politisi perempuan dalam keanggotaan dan kepengurusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* dengan jumlah informan 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan teknik *cross check*. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kinerja partai politik Gerindra dalam kaderisasi keanggotaan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bergabung dalam partai politik, belum ada perlakuan khusus dalam kaderisasi keanggotaan politisi perempuan; *kedua*, kaderisasi partai politik Gerindra dalam kepengurusan pada tingkat DPC Kota Yogyakarta sudah menempatkan politisi perempuan, terdapat pendidikan kader yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat di Hambalang Bogor; *ketiga*, kinerja partai politik Gerindra untuk meningkatkan keterwakilan politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta belum sepenuhnya melembaga dan terstruktur pelaksanaannya dari tahun ke tahun, meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta merupakan terobosan Ketua DPC Gerindra Kota Yogyakarta sebagai strategi alternatif untuk menyiasati masih rendahnya keterwakilan perempuan pada Pemilu sebelumnya.

Kata kunci : Kinerja, Partai Politik Gerindra, Politisi Perempuan, Kaderisasi.

Abstract

This study describes the performance of Gerindra political parties in the regeneration of female politicians in the Yogyakarta City DPRD as well as the regeneration of female politicians in membership and stewardship. This research is a qualitative descriptive study. The research subjects were determined using a purposive technique with 5 informants. The technique of collecting data is done by interviews and documentation. The validity of the data is checked by cross check technique. The technique of analyzing data is through stages of reduction, presentation, and verification. The results of this study indicate that first, the performance of Gerindra political parties in the regeneration of membership provides equal opportunities between men and women to join political parties, there has been no special treatment in the cadre regeneration of women's politician membership; second, the regeneration of the Gerindra political party in the management at the DPC level in the city of Yogyakarta has placed female politicians, there is cadre education conducted by the Central Executive in Hambalang Bogor; thirdly, the performance of Gerindra political parties to increase representation of female politicians in Yogyakarta City DPRD has not been fully institutionalized and structured

implementation from year to year, increasing women's representation in Yogyakarta City DPRD is a breakthrough Chairperson of Yogyakarta City DPC Gerindra as an alternative strategy to deal with the low representation of women Previous elections.

Keywords : Performance, Gerindra Political Parties, Female Politicians, Cadreation.

PENDAHULUAN

Partai Politik Gerindra merupakan partai politik besar yang ada di Indonesia. Partai politik Gerindra berdiri pada tahun 2008, dan mengikuti pemilu pertama kali pada tahun 2009. Sepak terjang partai politik Gerindra dimulai dari Pemilu pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang pesat hingga Pemilu 2019 jika dilihat dari keterwakilan calon legislatif menjadi legislator di lembaga legislatif.

Di Kota Yogyakarta khususnya di DPRD Kota Yogyakarta, pada Pemilu tahun 2009 partai politik Gerindra mampu menempatkan 2 (dua) calon legislatifnya menjadi legislator di DPRD Kota Yogyakarta, dengan 1 (satu) politisi perempuan. Pada Pemilu tahun 2014 partai politik Gerindra mampu menempatkan 5 (lima) calon legislatif menjadi calon terpilih di DPRD Kota Yogyakarta dengan total keterwakilan perempuannya berjumlah 5 (lima) orang perempuan dari 10 (sepuluh) politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta. Sehingga 100% fraksi partai politik Gerindra di DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah perempuan.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta menarik untuk diteliti oleh peneliti. Dalam Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017, dalam pasal 173 ayat (2) huruf e yang berbunyi bahwa:

“Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Jika dilihat dari segi kesempatan berpolitik perempuan memiliki peluang yang besar, dengan diakomodasinya kebijakan *affirmative action* yaitu kebijakan minimal keterwakilan 30% (tiga puluh persen)

perempuan dalam politik dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adinda Tenriangke Muchtar yang dikutip oleh Mukhamad Murdiono (2010: 3-4) keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Pemenuhan kebutuhan minimal kuota 30% perempuan merupakan sesuatu yang penting, diantaranya adalah tanggungjawab dan kepekaan terhadap isu- isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan melakukan pekerjaan *multitasking* dan pengelolaan waktu, alasan tersebut menjadi modal dasar kepemimpinan perempuan memiliki kepekaan isu dalam masalah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja partai politik Gerindra untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini dimulai dari kaderisasi politisi perempuan dalam keanggotaan, kepengurusan hingga kinerja partai politik Gerindra dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta. Implementasi atau pelaksanaan partisipasi perempuan di bidang politik diperlukan karena adanya amanat dari Undang-Undang, serta prinsip kesetaraan gender dan keadilan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian tentang sebuah hasil yang dilakukan, maupun aktivitas yang dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Istilah kinerja sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kinerja” atau “presentasi” (Yeremias T. Keban, 2004: 191). Definisi kinerja menurut

Bastian dalam Hessel Nogi dalam, (Yeremias T. Keban 2004: 193) yang menyebutkan bahwa kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian, atau hasil kerja dalam suatu kegiatan maupun aktivitas ataupun program yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dalam sebuah organisasi, faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari adanya faktor internal maupun eksternal yang dikemukakan oleh Atmosoprto, dalam Heseel Nogi (2005: 181) bahwa kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial. Faktor internal terdiri dari tujuan organisasi, struktur organisasi, sumberdaya manusia, dan budaya organisasi.

2. Kaderisasi Partai Politik

Partai politik berasal dan berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2013: 403).

Hubungan antara partai politik dengan kaderisasi adalah erat, partai politik memberikan kesempatan warga negara bergabung dan meningkatkan kapasitas diri dan bergabung dalam partai politik, untuk menyalurkan aspirasinya.

Kaderisasi menjadi hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti

dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. (Syamsuddin Haris dkk, 2016: 51).

Selain itu, organisasi kepentingan terasosiasi dengan partai, artinya partai memiliki jaringan dan dukungan organisasi kepentingan. Sebaliknya partai disebut memiliki akar yang lemah pada masyarakat apabila hanya sebagian warga memilih partai yang sama. Sebaliknya, warga memilih sesuai dengan calon atau, jika mereka memilih karena label partai, mereka beralih ke partai lain karena preferensi-preferensi tertentu (Mainwaring, 1955: 7).

Agar proses kaderisasi ini dapat terjaga kesinambungannya, maka dibutuhkan pelebagaan sistem kaderisasi yang baku, berjenjang, dan menganut prinsip meritokrasi. Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelebagaan sistem kaderisasi, yang sebenarnya menjadi ciri khas pelebagaan demokrasi dalam internal partai, yakni dimensi formal dan dimensi politis (Syamsuddin Haris dkk, 2016: 50).

Menurut Syamsuddin Haris dkk (2016: 51) Dimensi formal berkenaan dengan soal bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi, ideologi dan perjuangan partai butuh dicangkokkan melalui instrumen program pendidikan dan pembentukan lembaga yang khusus mengelola kaderisasi. Sedangkan dimensi politis menempatkan kaderisasi dalam makna ruang politik, yakni ruang tarik-menarik atau kompetisi berbagai kepentingan atau faksi-faksi internal partai yang rawan konflik.

Kaderisasi berhubungan dengan timbal balik partai politik dalam mendapatkan kualitas kader yang sesuai

dan mampu untuk mengembangkan partai politik sesuai dengan visi misi dan cita-cita partai politik yang bersangkutan. Dalam hal ini kaderisasi juga berhubungan dengan rekrutmen partai politik untuk mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan visi misi dalam sebuah partai politik.

Menurut Syamsuddin Haris dkk (2016: 51) cara mengetahui sebuah partai politik melakukan kaderisasi atau tidak ialah:

1. Adanya kurikulum atau silabus kaderisasi;
2. Adanya divisi yang menjadi penanggungjawab kaderisasi
3. Ada rentang waktu yang jelas untuk masing-masing level penjenjangan kaderisasi
4. Output dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang didasar masing-masing level kaderisasi.

Syarat partai politik melakukan kaderisasi atau tidak, dapat dilihat dari empat syarat diatas sehingga partai politik yang belum memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendapatkan kader-kader politik yang sesuai dengan fungsi partai politik.

Kemudian menurut Syamsuddin Haris, dkk (2016: 52) partai harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup:

1. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan
2. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis
3. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan
4. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi

5. Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan dalam paratari politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik.; dan

6. Model pembinaan perempuan kader politik, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan

Dalam melaksanakan kaderisasi, komitmen tidak hanya cukup mencatulkannya di dalam AD/ART, komitmen tersebut haruslah di terjemahkan dalam program-program partai dalam setiap periode dan tingkatan kepengurusan yang ada.

METODE

PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan maupun menggambarkan informasi tentang pokok bahasan dalam penelitian serta diperoleh data deskriptif mengenai kinerja partai politik Gerindra dalam kaderisasi politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta dan mengetahui kaderisasi politisi perempuan Gerindra dalam keanggotaan dan kepengurusan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kota Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono, No.43, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta Jalan Batikan, No.70 Pandeyan, Umbulharjo dan Kantor sekretariat PIRA (Perempuan Indonesia Raya) Jalan Nitikan Baru, No. 17, Pandeyan, Umbulharjo. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019.

Penentuan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu menentukan subjek yang berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Subyek dalam

penelitian ini adalah Ketua DPC Partai Gerindra, wakil ketua DPC Gerindra, Biro OKK (Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan), politisi perempuan Gerindra di lembaga legislatif dan sayap partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam proses kaderisasi dalam keanggotaan maupun kepengurusan partai politik Gerindra di Kota Yogyakarta
2. Subjek penelitian ialah biro atau divisi yang membawahi proses pelaksanaan kaderisasi dalam keanggotaan maupun kepengurusan
3. Orang yang sudah bergabung dalam partai politik Gerindra khususnya perempuan yaitu politisi perempuan
4. Pihak yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Kelebihan menggunakan wawancara ini adalah informan lebih leluasa untuk menyampaikan ide, pendapat dan gagasannya. Namun demikian, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara untuk menanyakan pertanyaan kepada informan. Informan memberikan jawaban yang tidak terbatas dan tidak ditentukan oleh peneliti, sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam. Wawancara ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lengkap, baik berupa jawaban dan informasi-informasi, yang dapat memudahkan peneliti.

Peneliti menggunakan dokumen resmi internal seperti SK Pengurus,

laporan pemilu dari KPUD Kota Yogyakarta, maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung. Sedangkan dokumen resmi eksternal seperti berita maupun buletin yang diterbitkan oleh Partai Politik Gerindra melalui *website* resmi Partai Gerindra. Peneliti juga menggunakan foto untuk melengkapi data penelitian, seperti foto kegiatan maupun penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara dan dokumentasi. Pedoman wawancara yang berisi mengenai pertanyaan-pernyataan yang akan disampaikan kepada informan, sedangkan pedoman dokumentasi berisi daftar dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dari wawancara.

Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data *cross check*. Teknik pemeriksaan ini membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif, dimana kesimpulan dilakukan berdasarkan fakta atau peristiwa khusus untuk menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Simpulan hasil penelitian dilakukan menggunakan analisis yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan jelas dan rinci. Tahapan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini merujuk pada analisis data model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kaderisasi Politisi Perempuan dalam Keanggotaan

Kaderisasi perempuan dalam keanggotaan, memberikan kesempatan terhadap politisi perempuan untuk

bergabung dalam tingkat ranting, cabang hingga pusat. Kaderisasi merupakan kegiatan partai politik untuk melakukan rekrutmen dengan cara menanamkan nilai-nilai dalam partai politik yang berisi visi misi dan materi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader, dan membentuk kader yang memiliki loyalitas terhadap partai.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan subjek penelitian, upaya partai Gerindra dalam menjaga kesinambungan dalam kaderisasi partai politik Gerindra memiliki pelebagaan sistem kaderisasi yang baku dan berjenjang. Sistem kaderisasi dalam partai politik Gerindra berjenjang sesuai dengan wilayah, dimulai dari ranting, cabang anak cabang, daerah hingga pusat.

Semua warga negara Indonesia yang memiliki keinginan untuk bergabung dalam partai politik Gerindra, diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar. Dalam keanggotaan, calon kader mendapatkan pengetahuan secara umum bagaimana visi misi partai Gerindra, kemudian calon kader memutuskan untuk bergabung, dengan mendaftarkan diri secara *online* atau dapat mendaftarkan diri melalui sekretariat partai Gerindra tingkat ranting, maupun cabang.

Tidak ada batasan tingkat pendidikan untuk bergabung menjadi anggota partai politik Gerindra, selama sudah cukup umur yaitu minimal 17 tahun yang sudah mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Memiliki keinginan yang kuat untuk bergabung dan memiliki loyalitas terhadap partai politik. Kaderisasi keanggotaan berhubungan erat dengan adanya timbal balik partai politik yang nantinya akan mendapatkan kualitas kader yang sesuai dan mampu untuk melakukan ciata-cita politik yang bersangkutan.

Keanggotaan dalam partai politik Gerindra tidak mengenal adanya perbedaan *Kinerja Partai Politik...*

(Devita Lili Oktaviana) 9 gender baik laki-laki perempuan. Tidak ada kuota khusus untuk menerima kader yang akan bergabung dalam partai politik Gerindra. Kesempatan untuk bergabung dalam partai politik diberikan seluas-luasnya kepada semua masyarakat atau warga negara yang ingin bergabung dalam partai politik.

Sentralisasi yang ada dalam partai politik Gerindra seperti kaderisasi terpusat yang diadakan oleh pimpinan pusat Gerindra yang ada di Jakarta. Pimpinan pusat memiliki wewenang untuk menentukan, bagaimana proses pendidikan kaderisasi yang akan diberikan oleh kader dalam partai politik. Kurikulum serta materi kaderisasi dibuat oleh pimpinan pusat partai politik Gerindra, kader-kader yang kemudian dididik di pusat merupakan kader partai politik Gerindra yang menjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) maupun mereka yang sudah menjadi anggota dewan. Pendidikan kader juga diberikan kepada anggota dewan yang sudah menjabat sebagai bentuk peningkatan kualitas anggota dewan legislatif dari partai politik Gerindra khususnya perempuan.

Dalam kaderisasi keanggotaan partai politik Gerindra, terdapat perjenjangan kader seperti pada partai politik lainnya. Dalam perjenjangan kaderisasi partai politik didasarkan pada tingkatan yang bertahap atau bertingkat. Penyebutan perjenjangan kaderisasi dalam partai politik berbeda-beda.

2. Kaderisasi Politisi Perempuan dalam Kepengurusan

Kepengurusan partai politik Gerindra khususnya di DPC Kota Yogyakarta masih di dominasi oleh laki-laki. Kepengurusan yang ada dalam partai politik Gerindra di mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan biro-biro yang ada dibawahnya. Biro-biro yang ada di DPC Partai Politik Gerindra belum

terlalu diperjelas, menurut SK 09-0348/Kpts/DPP- GERINDRA/2017.

Berdasarkan SK Pengurus di atas, perempuan ditempatkan pada posisi strategis sebagai Bendahara I yang ditempati oleh subjek penelitian peneliti yaitu Ibu Ririk Banowati Permanasari, S.H, sisanya masih ditempati oleh laki-laki, mulai dari ketua, wakil hingga sekretaris, akan tetapi peran perempuan masih terlibat pada posisi Wakil Ketua yang ditempati oleh (empat) perempuan, dan sekretaris III.

Posisi perempuan masih belum terlihat jika dilihat dalam SK kepengurusan di DPC Kota Yogyakarta jika dilihat berdasarkan posisi kepengurusan yang utama, perempuan masih banyak menempati dalam ranah wakil. Jika dilihat dari segi keterwakilan perempuan, dalam partai politik Gerindra sudah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut bergabung dalam kepengurusan khususnya di DPC Kota Yogyakarta secara hirarki kepengurusan.

Jumlah pengurus dalam DPC Partai Politik Gerindra adalah 15 (lima belas) orang dengan istruktur kepengurusan di mulai dari Ketua yang berisikan 1 (satu) orang, kemudian wakil ketua yang memiliki 9 orang anggota, sekretaris 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) sekretaris utama, dan bendahara yang berisikan 2 (dua) orang dengan 1 (satu) bendahara utama. Jumlah perempuan dalam kepengurusan DPC Gerindra Kota Yogyakarta adalah 8 (delapan) orang, dengan, total 15 (lima belas) pengurus partai.

Kepengurusan merupakan posisi yang penting dalam partai politik. Pengurus partai politik memiliki peranan yang lebih dalam keberlangsungan roda partai politik, mengurus berbagai hal yang menyangkut eksistensi partai politik, serta sebagai pelaku agenda dan kegiatan politik berjalan seiringan dengan pelaksanaan AD/ART serta visi misi partai politik Gerindra.

Kaderisasi kepengurusan dalam partai politik Gerindra khususnya di DPC Kota Yogyakarta merupakan wewenang ketua DPC yang nantinya akan merekrut anggota partai politik yang memiliki kualitas dan loyalitas terhadap partai politik. Pendidikan kader salah satu bentuk dari kaderisasi politisi perempuan Gerindra yang menjadi pengurus.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti, pendidikan kaderisasi Gerindra di laksanakan di Hambalang, Bogor. Tidak semua politisi perempuan Gerindra mendapatkan pendidikan kader di Hambalang Bogor, pendidikan kader di Hambalang dikhususkan untuk pengurus dan wakil yang di pilih untuk mewakili Provinsi DIY dan kota Yogyakarta. Pendidikan kader yang dilakukan oleh pengurus partai politik Gerindra sesuai dengan kurikulum dan materi kaderisasi yang sudah di tetapkan oleh pimpinan pusat yang berada di Jakarta. Lama pendidikan kader yang di dapatkan oleh pengurus maupun anggota dewan partai politik Gerindra mengikuti keputusan pimpinan pusat, rentang pendidikan 10 – 15 hari yang berada di Hambalang, tidak sama setiap tahun.

Sistem pendidikan kader di Hambalang dapat dikatakan semi militer, sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dilapangan yang diutarakan oleh subjek penelitian. Pendidikan kader yang dapat dikatakan menggunakan konsep semi militer adalah seperti adanya materi pelatihan kedisiplinan, latihan baris berbaris, dan latihan perlindungan diri seperti karate. Selain itu secara rinci subjek penelitian memaparkan bagaimana mereka diberi waktu untuk beristirahat ketika malam hari, dan dibangun pagi hari dengan menggunakan pengeras suara sama seperti pendidikan militer. Pelatihan kedisiplinan yang lain juga dapat di lihat bagaimana kader-kader partai politik Gerindra di latih untuk menghargai waktu di mulai dari hal-hal kecil seperti makan, mandi dan mempersiapkan diri.

Waktu yang ditempuh kader yang melaksanakan pendidikan di Hambalang tidak selalu sama, karena waktu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi Pusat, yaitu DPP. Dalam hal ini kader yang mengikuti adalah anggota legislatif yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten se-Indonesia. Menurut hasil penelitian dari subjek penelitian tidak ada perlakuan yang istimewa bagi kader, pendidikan dan pelatihan sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap para subjek mengatakan bahwa kaderisasi partai politik Gerindra yang berada di Hambalang dapat dikatakan semi militer, karena disana semua kader atau anggota baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama. Pendidikan kader mengutamakan kedisiplinan, keteraturan dari hal-hal kecil seperti saat makan, membereskan tempat tidur, menata sepatu dan keteraturan dalam mengantri, kemudian para kader atau anggota diajarkan baris-berbaris sesuai dengan aturan baku, sikap yang benar dan baik saat upacara bendera, dan pembekalan diri seperti silat. Selama 10-15 hari anggota dibekali oleh ilmu dasar kepemimpinan, cinta tanah air, dan membentuk jiwa nasionalisme.

Menurut subjek penelitian peneliti yang sudah ikut pendidikan di Hambalang, materi-materi dan kegiatan disana sangat berpengaruh dan membentuk kepribadian kader yang mandiri dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Diharapkan dengan adanya pendidikan kader di Hambalang tersebut, perwakilan setiap daerah yang ikut mampu memberikan dampak yang baik terhadap kader lain tempat daerahnya berasal. Baik laki-laki dan perempuan yang telah ikut pendidikan di Hambalang memiliki nilai yang lebih dan mampu untuk menjadi pemimpin di daerahnya.

Kader laki-laki dan perempuan yang berada di Hambalang sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama. Kader perempuan yang ikut menjalani pendidikan kader juga mengikuti baris berbaris, pelatihan bela diri dan pelatihan lain yang sama dengan kader laki-laki. Perbedaan mereka hanyalah pada barak tempat tidur antara laki-laki dan perempuan, barak antara laki-laki dan perempuan ditempatkan terpisah.

Berdasarkan penuturan subjek penelitian, dahulu Hambalang yang digunakan untuk pendidikan kader adalah tempat untuk menernak kambing-kambing yang kemudian disulap oleh pimpinan pusat partai politik Gerindra untuk pendidikan kader. Berkenanaan dengan tempat melakukan pendidikan kader, cukup luas untuk mendidik perwakilan kader dari setiap daerah. Materi-materi mengenai ideologi negara, visi misi partai politik, persatuan dan kesatuan merupakan materi umum yang di berikan kepada kader-kader partai politik, di harapkan dengan adanya pendidikan kader ini, maka kepengurusan yang ada di setiap daerah dapat berjalan efektif, memegang prinsip dan asas kenegaraan, kebangsaan dan kebersamaan yang akan menghasilkan kebijakan dan keputusan yang berlandaskan kesejahteraan rakyat bersama, dengan mengesampingkan kepentingan golongan.

3. Kinerja Partai Gerindra dalam Kaderisasi untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta

Hasil dari tahun 2009 keterwakilan perempuan dalam anggota dewan di DPRD Kota Yogyakarta berjumlah 1 (satu) orang, dengan jumlah keterwakilan partai politik Gerindra di DPRD Kota Yogyakarta berjumlah 2 (dua) orang. Yaitu Agustina Christiani dan Anton Prabu Semendawai, S.H. pada tahun 2009 perempuan Gerindra lolos menjadi anggota DPRD Kota

Yogyakarta berjumlah 1 (satu) orang, dengan total dua keterwakilan kader Gerindra dalam lembaga legislatif satu laki-laki dan satu perempuan, jumlah calon legislatif adalah 29 (dua puluh sembilan) dengan 10 (sepuluh) orang perempuan dari partai Gerindra. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan, politisi perempuan Gerindra mampu mewakili seluruh dapil yang ada di Kota Yogyakarta, yang berjumlah 5 (lima) dapil. Disemua dapil di kota Yogyakarta semua politisi perempuan Gerindra lolos menjadi caleg terpilih di DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019. Jumlah calon legislatif pada pemilu tahun 2014 adalah 40 (empat puluh) calon legislatif dari partai Gerindra, dengan total keterwakilan perempuan Gerindra berjumlah 15 (lima belas) dengan jumlah calon terpilih adalah 5 (lima) perempuan disemua dapil. Pada Pemilu Tahun 2019-2024 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) calon legislatif dari partai Gerindra, dengan total 15 (lima belas) perempuan dari partai Gerindra, 5 caleg perempuan petahana pada tahun 2014 mendapatkan prioritas nomor urut 1 (satu).

Prestasi dalam kinerja kaderisasi pada pemilu tahun 2014 dapat dikatakan baik, fraksi anggota dewan partai politik Gerindra adalah 100% (seratus persen) terwakilkan oleh perempuan di DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan di bandingkan pada tahun 2009. Pada tahun 2009 calon tetap DPRD Kota Yogyakarta berjumlah 29 orang dengan total ada 10 (sepuluh) keterwakilan perempuan dan 1 (satu) orang perempuan yang berhasil menjadi calon tetap mewakili DPRD Kota Yogyakarta.

Kemudian pada tahun 2019 seluruh politisi perempuan Gerindra selaku petahana maju kembali dalam pemilihan umum, yang kemudian mendapatkan prioritas nomor urut 1 (satu) pada semua dapil yang ada di

kota Yogyakarta. Total Calon Daftar Tetap (DCT) pemilu legislatif pada tahun 2019 di DPRD Kota Yogyakarta berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan total keterwakilan perempuan berjumlah 15 (lima belas) orang. Menurut penuturan ketua DPC pada pemilu legislatif 2019 partai Gerindra menargetkan akan meraih 10 (sepuluh) kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Ketua DPC Gerindra mengatakan strategi memasang caleg perempuan pada nomor urut 1 sebagai strategi amunisi untuk menyukseskan target 10 kursi, kota Yogyakarta yang terbagi dalam lima daerah pemilihan.

Meningkatnya keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta, tidak hanya dukungan dari terobosan ketua DPC Gerindra. Biro OKK (Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan) memiliki peran dalam memberikan bimbingan kepada perempuan, dalam agenda rapat maupun penguatan secara personal.

Peneliti menemukan belum adanya kaderisasi yang melembaga dalam kaderisasi politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta untuk meningkatkan keterwakilannya di lembaga legislatif. Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2014 merupakan terobosan dari Ketua DPC Gerindra dalam berkaca dari kurangnya keterwakilan perempuan pada pemilu sebelumnya. Dalam hal ini diperlukan adanya kaderisasi yang melembaga dan jelas, mulai kaderisasi dari anggota partai politik Gerindra dan sayap partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya) agar bisa menopang keterwakilan perempuan dalam anggota dewan.

Kaderisasi yang belum melembaga tersebut memberikan dampak, keterwakilan perempuan dalam partai politik Gerindra di DPRD Kota Yogyakarta yang belum sepenuhnya dapat konsisten, jika kaderisasi dalam partai sudah melembaga permasalahan partai politik

dalam pelaksanaan keterwakilan pada pemilihan umum dan kepengurusan tidak akan mengalami kendala, karena sudah di persiapkan dari jauh-jauh hari siapa saja perempuan dalam keanggotaan dan kepengurusan yang memiliki loyalitas dan kemampuan baik untuk menjadi anggota dewan.

SIMPULAN DAN

SARAN Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. *Pertama*, Kinerja kaderisasi politisi perempuan Gerindra dalam keanggotaan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bergabung dalam partai politik Gerindra mulai dari tingkat ranting, anak cabang, cabang, hingga daerah, belum ada perlakuan khusus untuk kaderisasi perempuan dalam keanggotaan, *Kedua* perempuan sudah ditempatkan dalam kepengurusan, kaderisasi kepengurusan ditetapkan oleh pusat untuk pendidikan kadernya yaitu di Hambalang Bogor selama 10-15 hari ada pula yang 4 hari, sesuai dengan instruksi pusat. Pendidikan kader dapat dikatakan semi militer berdasarkan penuturan subjek penelitian. Kaderisasi dilakukan khusus bagi pengurus atau anggota dewan yang sudah terpilih, *Ketiga*, Peneliti menemukan belum adanya kaderisasi yang melembaga dalam kaderisasi politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta untuk meningkatkan keterwakilannya di lembaga legislatif. Meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu sebelumnya oleh Ketua DPC Gerindra.

Saran

1. Dalam kaderisasi keanggotaan partai Gerindra, diperlukan adanya kaderisasi yang mengakar dari tingkat daerah hingga ranting, hal ini guna menunjukkan keseriusan partai politik Gerindra khususnya untuk mendukung adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan partai politik. Jika partai Gerindra mampu menjangkau

semua ranah daerah hingga ranting, maka akan banyak tercipta kader yang memiliki loyalitas dan militan terhadap partai politik.

2. Kaderisasi dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra sudah baik, partai Gerindra sudah mampu menempatkan perempuan dalam kepengurusan dengan jumlah 8 (delapan) orang perempuan dari total 15 (lima belas) pengurus di DPC Partai Gerindra. diperlukan adanya internalisasi nilai-nilai partai politik, dan pemberian wawasan mengenai *policy making* kepada pengurus dan anggota dewan yang sudah menjabat, oleh DPC Partai Gerindra khususnya tidak hanya melalui pendidikan kader dari pusat di Hambalang, melainkan dari DPC Gerindra Kota Yogyakarta khususnya.

3. Diperlukan adanya pola pembinaan kader yang terprogram, terstruktur dan komprehensif serta berlaku untuk semua lini kader dan wilayah seperti yang diungkapkan oleh Syamsuddin Haris (2016: 52), yang mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk pengkaderan umum dan khusus
2. Model rekrutmen yang terbuka dan demokratis
3. Sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan
4. Intensitas interaksi antar kader untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas dan loyal
5. Pelaksanaan kebijakan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan dalam partai politik, anggota, pengurus, dan jabatan public
6. Model pembinaan perempuan kader politik, baik dari strategi pembinaan, materi maupun metode yang disesuaikan dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. (2002). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (ed). (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hessel, Nogi. (2005) *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- KPUD DIY. *Prosentase Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota Provinsi DIY 2014*, diakses pada <http://diy.kpu.go.id/web> 13 Februari 2019 pukul 12.12 WIB.
- Moelong Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhamad Murdiono. (2010). *Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Socia, Vol.7 No.1 Mei diakses melalui http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132304487/B5JURNAL%20SOCIA%20FISE%20UNY_0.pdf pada 6 Februari 2019 pukul 23.26 WIB.
- Siavelis, Peter M., dan Scott Morgenstern. (2008). *Pathways To Power, Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*. The Pennsylvania: State University Press.
- Syamsuddin Haris, dkk. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi dan P2Politik LIPI, diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi-Parpol-Ideal.pdf> pada 27 Desember 2018 pukul 19.13 WIB.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pilihan Presiden Tahun 2019.
- Zaenal Mukarom. (2005). *Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. Terakreditasi Dirjen Dikti Surat Keterangan, Nomor 56/DIKTI/Kep/2005 diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1125> pada 13 Januari 2019 pada 17 Desember 2018 pukul 15.26 WIB,